

## ABSTRAK

Permasalahan mengenai pertanahan terjadi karena disebabkan akibat saling klaim penguasaan hak atas tanah yang pada akhirnya menjadi suatu sengketa. sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat dalam setiap tahunnya. Suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa dan akan diselesaikan melalui bantuan seorang mediator.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. (2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Bahan penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dimulai dari pengaduan, menelaah, pemanggilan kedua belah pihak, upaya mediasi, setelah adanya kesepakatan dituangkan kedalam Berita Acara Mediasi. penyelesaian mediasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip win-win solution dan hasil akhir atas dasar kesepakatan para pihak. namun dalam implementasinya mediasi berjalan kurang efektif karena tidak semua kasus sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional tetapi ada pula sengketa yang tidak mendapatkan kesepakatan dikembalikan kepada para pihak untuk diselesaikan melalui kekeluargaan ataupun pengadilan. (2) Hambatan dalam melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yaitu: faktor internal kurangnya sumber daya manusia dalam subseksi seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan, dan faktor eksternal kaketidakhadiran para pihak dalam pelaksanaan mediasi, adanya kepentingan antara para pihak atau ikut campur untuk mengatasi hambatan tersebut maka solusi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati yaitu memberikan kembali undangan kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar. Namun apabila segala upaya mediasi yang telah dilakukan tidak ada kesepakatan antara para pihak maka dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.

**Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan**

## **ABSTRACT**

*Land problems occur because they are caused by mutual claims over land rights which in turn become a dispute. disputes in the land sector have never subsided, in fact, they have a tendency to increase every year. A dispute can be resolved by the parties through mediation by the National Land Agency upon the agreement of the two disputing parties and will be resolved through the assistance of a mediator.*

*The purpose of this thesis is (1) To determine the implementation of mediation in resolving land disputes at the Office of the National Land Agency. (2) This is to determine the obstacles and solutions to the Pati Regency National Land Agency in carrying out land dispute settlement mediation.*

*Methods This research uses sociological juridical research methods. With descriptive research specifications. The research material in this writing uses primary data and secondary data. For data collection using library research and field studies, and the analysis method used is qualitative.*

*The results of this study indicate that: (1) The implementation of mediation in the settlement of land disputes at the National Land Agency of Pati Regency is guided by the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the Land Agency No.11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases starting from complaints, examining, second summons both parties, mediation efforts, after an agreement is entered into the Minutes of Mediation. mediation settlement is carried out by prioritizing the principle of win-win solution and the final result based on the agreement of the parties. However, in its implementation, mediation is less effective because not all land dispute cases can be resolved through mediation at the National Land Agency, but there are also disputes that do not get an agreement to be returned to the parties to be resolved through kinship or court. (2) Obstacles in carrying out land dispute settlement mediation at the National Land Agency of Pati Regency, namely: internal factors, lack of human resources in the subsection of land problem handling and control, and external factors in the absence of the parties in the implementation of mediation, the existence of interests between the parties or participation. intervening to overcome these obstacles, the solution given by the Pati Regency National Land Agency is to give back an invitation to the disputing parties, and there may be no interference from outside parties. However, if all mediation efforts that have been made there is no agreement between the parties, it can be resolved through court channels.*

**Keywords: Implementation, Mediation, Settlement of Land Disputes**